

BAB I

PENGANTAR

1.1 Latar Belakang Masalah

Permulaan abad ke-20 ditandai dengan perkembangan ekonomi yang pesat dan perluasan jabatan Pemerintahan Hindia-Belanda di Nusantara. Kebijakan pemerintahan kolonial ini mengalami perubahan arah yang sangat mendasar karena mengambil tujuan baru berupa pengurangan eksploitasi wilayah kekuasaannya. Langkah-langkah tersebut diambil untuk mendukung pendekatan baru yang menekankan sikap keprihatinan akan rendahnya kesejahteraan negeri jajahan. Proses ini melahirkan konsep kebijakan Hindia-Belanda yang terkenal disebut *politik etis*¹ Konsep ini digunakan untuk melihat keadaan Nusantara ketika itu dalam pendekatan kemanusiaan yang diharap bisa berdampingan dengan keuntungan ekonomi. Munculnya kebijakan itu mengakibatkan perubahan-perubahan penting di lingkungan penjajahan. Meskipun, begitu kebijakan politik etis sebenarnya lebih banyak janjinya dari pada bukti pelaksanaannya. Fakta-fakta penting tentang eksploitasi dan penaklukan wilayah-wilayah jajahan dalam kenyataannya tidak mengalami banyak perubahan. Tapi, kebijakan ini tetap penting artinya secara historis karena sedikit banyaknya telah ikut memicu proses lahirnya suatu ‘kesadaran’ kolektif-terutama melalui kebijakan pengajaran bagi kaum pribumi-yang akhirnya melandasi gerakan-gerakan kebangsaan di kemudian hari.

Setelah masa perkembangan ekonomi dan perbaikan kondisi-kondisi materil sedang berlangsung, dilancarkan suatu pandangan bahwa kemakmuran pribumi telah sangat merosot. Pandangan ini dianggap sebagai bukti bahwa sejak berakhirnya abad ke-19 politik Hindia-Belanda dipaksa untuk menerima suatu metodologi baru. Pemerintah Hindia-Belanda menjadi

¹ Hasanuddin, Basri Amin, *Gorontalo Dalam Dinamika Sejarah Masa Kolonial ..*, hlm. 186. Politik etis yaitu Politik balas budi

lebih sadar akan tanggung jawab moral terhadap rakyat di tanah jajahannya. Begitupula pemerintah mulai memperhatikan kemajuan penduduk pribumi dan menganggap dirinya sebagai pelindung yang berkewajiban memberi bimbingan kepada penduduk pribumi. Dengan demikian sistem eksploitasi mulai diganti dengan politik pengajaran yang lebih baik. Dalam prosesnya, apa yang pemerintah Hindia-Belanda jalankan (1877-1942) merupakan sebuah praktik etika yang berkeping-keping. Di satu sisi hendak menunjukkan usaha memperhatikan dan membina kepentingan martabat pribumi sebagai suatu tanggung jawab etis, tapi di sisi lain kekuasaan kolonial dengan cara lain tetap dimantapkan.²

Sejak dahulu, bangsa-bangsa di dunia tertarik untuk menguasai Indonesia, terutama bangsa-bangsa Barat. Hal itu disebabkan oleh letak Indonesia yang sangat strategis dan kekayaan alamnya berlimpah-limpah. Dikatakan strategis karena Indonesia berada di persimpangan dua samudera dan dua benua. Selain itu Indonesia juga terletak di jalur perdagangan dunia. Di samping tanahnya sangat subur, Indonesia juga mempunyai kandungan alam yang banyak, seperti minyak, emas, dan tembaga. Di antara bangsa-bangsa Barat yang datang di Indonesia, Belanda yang paling bernafsu menguasai Indonesia. Untuk melaksanakan tekadnya itu Belanda mendirikan VOC. VOC adalah kongsi dagang Belanda yang mencari keuntungan yang sebesar-besarnya di Indonesia. Oleh karena itu, mereka tidak menghiraukan kemajuan Indonesia. Setelah satu abad malang melintang di Indonesia, pada tahun 1799 VOC dibubarkan. Adapun sebab-sebab jatuhnya VOC antara lain karena korupsi yang merajalela di kalangan para pegawainya. Selain itu, banyak pegawainya yang tidak cakap. Hal ini menyebabkan pengendalian monopoli perdagangan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Sebab lain adalah VOC banyak menanggung hutang. Hutang tersebut akibat peperangan yang dilakukan baik dengan rakyat Indonesia maupun dengan Inggris dalam memperebutkan kekuasaan di bidang perdagangan. Selain itu terjadi

² Hasanuddin, Basri Amin, *Gorontalo Dalam Dinamika Sejarah Masa Kolonial* (Yogyakarta: Ombak, 2012), hlm. 186-187

kemerosotan moral di kalangan para pegawai akibat sistem keuangan yang dinilai kurang transparan. Keserakahan VOC membuat penguasa lokal tidak bersungguh-sungguh membantu VOC dalam perdagangan. Akibatnya, rempah-rempah yang diperoleh VOC tidak seperti yang diharapkan. Penyebab terakhir adalah tidak jalannya *Verplichte leverantien* (penyerahan paksa) dan *Preangerstelsel* (aturan Priangan) karena korupsi dan biaya pengeluaran yang terlalu besar. Kedua aturan itu dimaksudkan untuk mengisi kas VOC yang kosong. *Verplichte leverantien* mewajibkan penduduk menyerahkan hasil bumi berupa lada, kayu, kapas, beras, nila, dan gula kepada VOC dengan tarif yang ditentukan VOC. *Preangerstelsel* mewajibkan rakyat menanam kopi lalu menyerahkannya kepada VOC dengan tarif yang ditentukan VOC. Setelah VOC bubar, Indonesia diserahkan kepada pemerintah Belanda (Republik Bataaf). Pegawai-pegawai VOC menjadi pegawai pemerintah Belanda. Hutang VOC juga menjadi tanggungan negeri Belanda. Dengan demikian sejak tanggal 1 Januari 1800 Indonesia dijajah langsung oleh negeri Belanda. Sejak saat itu Indonesia disebut Hindia Belanda. Sejak itu di Indonesia berlangsung masa kolonialisme.

Kolonialisme adalah sistem di mana suatu negara menjalankan politik pendudukan atau penjajahan. Setelah Indonesia menjadi Hindia Belanda, ternyata nasibnya juga tidak lebih baik dibanding masa VOC. Hal ini disebabkan karena karakter pimpinan kolonial di Indonesia yang kurang bersahabat dengan rakyat dan tujuan Belanda menguasai Indonesia juga tidak berubah. Indonesia yang sejak dahulu telah dikenal sebagai penghasil rempah-rempah, selalu menjadi incaran banyak bangsa untuk menguasai Indonesia. Tidak heran banyak terjadi perang antarbangsa untuk memperebutkan Indonesia. Seiring dengan uraian di atas, maka pada bagian berikut ini akan diuraikan tentang masa politik kolonial liberal (1800-1811), masa penjajahan liberal di Indonesia atau masa pemerintahan Raffles (1811-1816),

masa Komisi Jenderal (1816-1819), sampai dengan masa pemerintahan Van der Capellen (1819-1825).³

Dalam perkembangannya semua bekas jajahan Belanda di Asia Tenggara itu oleh Inggris dibagi empat, yaitu Sumatera Barat, Malaka, Maluku, dan Jawa serta daerah sekitarnya. Seluruhnya dikuasai oleh Gubernur Jenderal EIC (East Indian Company), Lord Minto yang berkedudukan di Calcutta (India). Pulau Jawa diserahkan kepada Thomas Stamford Raffles selaku wakil Lord Minto di Pulau Jawa dengan pangkat Letnan Gubernur. Untuk melancarkan pemerintahannya, Raffles membagi Pulau Jawa menjadi 16 keresidenan (pada masa Daendels hanya dibagi menjadi 8 prefektur). Tiap-tiap keresidenan dibentuk badan pengadilan (*landraad*). Karena ancaman musuh tidak ada, maka tugas utama Raffles adalah memperbaiki nasib rakyat. Dalam rangka memperbaiki nasib rakyat, pajak hasil bumi (*kontingen*) dan leveransi paksa dihapus diganti pajak tanah (*landrente*). Dengan pengertian bahwa semua tanah milik Gubernemen sehingga rakyat wajib membayar rente atau sewa. Pajak tanah ditetapkan sebesar 2/5 hasil panen, boleh dibayar dengan hasil bumi atau uang. Di samping itu, Raffles juga menjual tanah Gubernemen kepada orang-orang swasta. Raffles juga melarang perdagangan budak dan *pandelingschap* (membayar hutang dengan tenaga). Raffles juga mengadakan monopoli garam. Di samping menganbil kebijakan dalam bidang politik dan ekonomi, Raffles juga memperhatikan bidang kebudayaan. Raffles menulis buku *History of Java* pada tahun 1817. Dengan giat Raffles membantu lembaga Betawi untuk kesenian dan pengetahuan. Ia juga memberi bantuan kepada ahli-ahli pengetahuan seperti Horsfield, Crewford, dan Mackensie, untuk meneliti sejarah Indonesia kuno. Setelah kedudukannya kuat, Raffles lalu mengambil berbagai tindakan terhadap raja-raja di Indonesia, misalnya:

1. Sultan Banten dan sultan Cirebon dijadikan sultan-sultan yang digaji.

³ *Ibid* hlm., 3

2. Sultan Hamengku Buwono II dari Yogyakarta diasingkan ke Pulau Penang dan puteranya dipaksa menggantinya sebagai Hamengku Buwono III.
3. Beberapa daerah kesultanan Yogyakarta pada tahun 1813 diserahkan kepada Pangeran Notokusumo, yang bergelar Paku Alam I di Pakualaman.
4. Paku Buwono IV harus menyerahkan Banyumas dan Madiun kepada Inggris. Ide dasar politik kolonial Raffles sebenarnya bertolak dari ideologi liberal dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan memberikan kebebasannya. Akibat pelaksanaan politik liberal itu, maka struktur tradisional dan feodal dirombak dan diganti dengan sistem baru yang didasarkan pada prinsip legalrasional.

Untuk melaksanakan politiknya, Raffles dihambat oleh unsur feodal yang sangat kuat kedudukannya dan sistem ekonomi yang masih bersifat tertutup sehingga pembayaran pajak belum dapat dilakukan sepenuhnya dengan uang, tetapi in natura (hasil bumi). Dengan demikian, politik kolonial berdasarkan liberalisme tidak cocok dan tidak realistis.⁴

Setelah Napoleon jatuh tahun 1814, Inggris dan Belanda mengadakan Traktat London I (1814). Traktat tersebut menyatakan bahwa semua daerah jajahan Belanda yang direbut Inggris, dikembalikan kepada Belanda, kecuali Kaapkoloni dan Sri Lanka. Keputusan itu mengecewakan Raffles. Ia tidak mau menyerahkan Indonesia kepada Belanda. Karena dipaksa, maka Raffles mengundurkan diri dan diganti John Fendall. Pada tahun 1816 John Fendall menyerahkan Indonesia kembali kepada Belanda.⁵

Awal abad ke-20 perkembangan politik Belanda mengalami perubahan arah dan mendasar. Eksploitasinya terhadap Indonesia khususnya di Gorontalo sebagai pembenaran utama atas kekuasaannya mulai berkurang dan digantikan dengan pernyataan-pernyataan

⁴ Wiharyanto A Kardiyat *Jurnal Masa Kolonial Belanda* (Yogyakarta :Universitas Sanata Dharma 2014) hlm. 6

⁵ *Ibid* hlm., 7

keprihatinan atas kejajateraan bangsa Indonesia Ricklefst.⁶ Perubahan tersebut dikenal dengan politik etis yang berdasar pada gagasan kewajiban moral dan hutang budi (een eereschuld) pemerintah kolonial terhadap tanah jajahan. Dalam pidato Ratu Wilhelmina pada bulan september 1901 menyatakan bermulanya zaman baru dalam politik kolonial dengan trilogi kebijakan kebijakan, edukasi, irigasi dan emigrasi Van Den Bosch.⁷ Periode ini menurut Van Deventer dan para pengikutnya adalah inti dan segala perubahan yang diinginkan. Selanjutnya bagi Van Deventer, tidak akan ada perubahan tanpa tenaga-tenaga pribumi yang berpendidikan cukup yang akan memikul beban itu Robert Van Niel.⁸

Untuk melihat gambaran Gorontalo pada masa Hindia Belanda, perlu diketahui pula kedudukan kedudukan Gorontalo pada masa VOC.⁹Verenigde Ostindische Compagnie VOC (Kompeni,Perusahaan Dagang Hindia Belanda) atau perserikatan, suatu sistem di mana suatu negara menguasai rakyat dan sumber daya Negara lain. Setelah merosotnya kekuasaan Gowa dan Ternate akibat penandatanganan kontrak atau perjanjian dengan VOC, khususnya melalui perjanjian Bungaya 18 November 1667. Penetapan kontrak Gowa dan Ternate pada intinya menguntungkan pada pihak VOC, sehingga VOC berhasil mengikat Gowa dan Ternate dengan memperluas kepentingan politiknya untuk menguasai negeri-negeri yang telah dikuasai kedua kerajaan tersebut. Berawal dari peristiwa inilah VOC menempatkan Gubernurnya di Ternate (Kepulauan Maluku) untuk lebih mudah mengatur kekuasaannya atas negeri-negerin dibawah pengaruh Gowa dan Ternate.

Runtuhnya kekuasaan Ternate dan Gowa telah menyebabkan seluruh hak kekuasaannya terlepas dan dibawah pengaruh VOC. Dengan demikian akibat perjanjian Bunganya

⁶ Ricklefst dalam Joni Apriyanto *Sejarah Gorontalo Modern*. (Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo Press, 2011) Hlm., 17

⁷ Van Den Bosch dalam Joni Apriyanto *Sejarah Gorontalo Modern*. *Ibid* Hlm., 17

⁸ Robert Van Niel dalam Joni Apriyanto *Sejarah Gorontalo Modern*. *Ibid* Hlm., 17

⁹ Verenigde Ostindische Compagnie VOC (Kompeni,Perusahaan Dagang Hindia Belanda) atau perserikatan, suatu sistem di mana suatu negara menguasai rakyat dan sumber daya Negara lain.

menyebabkan Gorontalo dan Limboto termasuk dalam pengawasan VOC. Kedatangan VOC melalui Gubernur Maluku Robertus Patbrugge pada 1677 di kawasan Nusa Utara negeri-negeri di bawah pengaruh Gowa dan Ternate berusaha menguasai wilayah tersebut sebagai bagian dari penaklukannya atas Gowa dan Ternate. Dalam memperkuat legitimasinya, VOC aktif melakukan ekspansi melalui kontrak atau perjanjian-perjanjian dengan kerajaan-kerajaan di belahan Nusa Utara Sulawesi dan usaha itu berhasil menempatkan kekuasaannya di Gorontalo pada 1677.¹⁰

Langkah awal dilakukan VOC dengan mengadakan kunjungan kenegeri-negeri yang dikuasai Gowa dan Ternate. Hal ini dimaksudkan untuk mengadakan penetrasi atas hegemoni Gowa dan Ternate. Pada 1677 Gubernur Maluku Padtbrugge mengunjungi Gorontalo. Pada 25 September 1677 tiba di Kwandang dan Padtbrugge disambut para pembesar Gorontalo dan Limboto, diantaranya Jogugu dan Kapitan Laut mewakili kedua kerajaan. Setelah diadakan pertemuan di Limboto, 26 September 1677, Padtbrugge bersama sekretaris raja Ternate dan Pachter Piater Tidesz mengunjungi Gorontalo dan tiba di Lupoyo. Tanggal 27 September 1677, di Lupoyo diadakan pertemuan yang juga dihadiri para Olongia To Tilayo dan Olongia To Huliyaia serta para pembesar Gorontalo dan Limboto. Dalam pertemuan disampaikan tujuan Gubernur Padtbrugge adalah memebritakan tentang telah disepakatinya perjanjian Bungaya, pada pasal 17 telah dicamtumkan bahwa Sultan Gowa mengakui hak-hak Ternate atas semua daerah Sulawesi yang letaknya antara Pulau Selayar dan Manado, serta semua tanah yang terbentang sampai Mandar.¹¹

Demikian Pula di sampaikan surat dari Sultan Mandarsyah (Ternate) yang berisi tentang pelepasan hak-hak dan pembebasan negeri atas ternate dan penagian upeti yang belum dibayarkan. Mengetahui tentang perjanjian Bungaya dan Surat Sultan Ternate, kedua kerajaan

¹⁰ *Ibid Gorontalo dalam Dinamika Sejarah Masa Kolonial* hlm., 57-58

¹¹ *Ibid* hlm., 58-59

merasa heran tentang perjanjian tersebut. Keheranan kedua kerajaan disebabkan karena baik Gowa maupun Ternate (sebenarnya) tidak pernah dirasakan menguasai Gorontalo dan Limboto. Walaupun demikian, hasil pertemuan tersebut merupakan cikal bakal VOC menanamkan pengaruhnya dan memperluas kepentingan politik ekonominya di Gorontalo dan Limboto.

Pada awal pendudukan VOC, kekuasaan pemerintahan Gorontalo dijabat Eyato sebagai *Olongia Totilayo* dan Bia sebagai *Olongia To Huliyaliya*. Bahkan dalam periode bersamaan dengan masuknya kekuatan VOC, raja Eyato berhasil melakukan pembaharuan dalam kerajaan, termasuk memperbaharui hukum adat dan Agama yang di atur dalam satu kesatuan. Dengan demikian hukum adat yang berlaku pada kerajaan harus didasarkan pada syariat yang bersumber dari Alquran dinyatakan tidak diberlakukan lagi dalam kerajaan.

Demikian pula peranan VOC yang berusaha menanamkan politiknya melalui keikutsertaannya untuk mengatur pemerintahan kerajaan. Sebagai akibat campur tangan Politik VOC, maka raja Eyato memindahkan pusat kerajaan di Duingi (Desa Tuladenggi, Kecamatan Kota Barat sekarang). Begitu juga raja Bia ikut menentang usaha-usaha kepentingan VOC. Berbagai penentangan dan perlawanan atas kepentingannya di Gorontalo telah menjadi ancaman tersendiri bagi VOC terutama karena peran Eyato. Selanjutnya VOC mengeluarkan perintah penangkapan pada Eyato. Pada akhirnya raja Eyato berhasil ditangkap tahun 1690 dan kemudian beliau di asingkan ke Ceylon (Srilanka) hingga wafat di sana, sehingga diberi gelar *Ta To Selongi*. (yang mulia yang wafat di Ceylon).¹²

Penangkapan Eyato tidak memadamkan perlawanan Gorontalo karena raja Bia tetap berperan aktif menentang kepentingan VOC di Gorontalo. Memahami peranan raja Bia yang ikut menentang kepenyingannya di Gorontalo, maka pada 1678 Gubernur Maluku Padtbrugge mengundang raja Gorontalo dan Limboto ke Ternate yang bertujuan untuk mengikat

¹² *Ibid* hlm.,59-60

Gorontalo dan Limboto melalui kontrak/parjanjian. Kedatangan utusan Gorontalo diwakili Olongia To Huliyaliya Bia, sedangkan Limboto di wakili Olongia To Huliyaliya Golade. Di Ternate mereka disambut oleh Padtbrugge mengajukan tuntutan kepada Gorontalo dan Limboto.¹³

Adapun isi perjanjian tersebut antara lain: bahwa raja dan pembesar kerajaan harus mengakui VOC di Gorontalo; Gorontalo wajib menyetor upeti kepada VOC; rakyat bersedia membantu VOC dalam mengusir pendudukan Spanyol di sangir Talaud; rakyat juga tunduk atas Agama Kristen Protestan yang ditawarkan VOC; dan raja-raja Gorontalo harus melarang kedatangan pastor Katolik yang diduga membawa pengaruh Spanyol.

Menindaklanjuti salah satu isi perjanjian Padtbrugge mengutus seorang pendeta Calvinis bersama raja Bia ke Gorontalo untuk menyiarkan Agama Protestan di Gorontalo dan membagikan 1.000 Bijbel kepada masyarakat agar dapat menganut agama Kristen. Namun kedatangan para pendeta utusan Padtbrugge mendapatkan penolakan dari pembesar kerajaan Gorontalo. Setelah menolak pendeta Calvinis, VOC kembali mengirim pendeta Baney ke Gorontalo untuk mengajarkan ajaran agam Kristn kepada masyarakat. Walaupun demikian usaha VOC kembali mengalami kegagalan. Penolakan kepada para pendeta memberi arti bahwa kulturisasi Islam di Gorontalo telah tertanam dan mengakar pada adat dan hukum adat dalam kehidupan masyarakat umum.

Peristiwa penolakan para pendeta secara langsung melanggar isi perjanjian di Ternate. Bahkan usaha berita tentang usaha perlawanan raja Bia atas perjanjian itu mendapat kecaman Gubernur Padtrugge. Untuk menghadapi serangan VOC, raja Bia kemudian memerintahkan pembangunan Kubu pertahanan keamanan di Padengo dan di Kabila, di sekitar sungai Bone.

¹³ *Ibid* hlm., 60

Strategi pembangunan pertahanan di Padengo dimaksudkan karena kawasan tersebut sering di lalui pihak VOC ketika mereka melalui jalur Dumoga (Bolaang mongondow).¹⁴

Pada 1679 VOC di bantu pasukan dari Sangir, Siau dan Tagulandang dengan dukungan 2 kapal besar dan 30 kora-kora berhasil menyerang Gorontalo. Kedatangan VOC disambut perlawanan dari raja Bia dan Jogugu Ilato serta dukungsn Jogugu Limboto Isnaeni. Besarnya Armada Pasukan Gabungan Voc, menyebabkan pasukan Gorontalo terdesak. Raja Bia dan pasukannya mengundurkan diri ke kampung Tutuno. Di kampung ini, raja Bia beserta kedua Jogugu Ilato dan Isnaeni berhasil di tangkap. Mereka ditawan ke Manado dan selanjutnya keternate, lalu raja Bia diasingkan ke kaap de Goede Hoop atau Tanjung Harapan (Afrika Selatan)

Setelah penangkapan Bia, VOC mulai menguasai Gorontalo dan Limboto. Padtbrugge mengajukan tuntutan kepada Olongia To Tilayo Lahay dan Olongia To Huliya Liya Lepe, selain pelaksanaan kontrak tahun 1679, juga kedua kerajaan tersebut diwajibkan setiap tahunnya harus menyerahkan 150 budak, 150 batang balok panjang 26 kaki, lebar, serta menghapus jabatan kapitan laut dalam kerajaan. Tuntutan VOC diikuti dengan cara memaksa raja Gorontalo dan Limboto menandatangani perjanjian yang memuat persetujuan bahwa Ternate telah menyerahkan semua haknya atas Gorontalo dan Limboto kepada VOC, demikian pula raja beserta pembesar kerajaan Gorontalo dan Limboto tunduk kepada peraturan VOC sejak 1681.

Beberapa Tahun kemudian, Padtbrugge kembali mengajukan tuntutan kepada Lahay dan Lepe untuk menyediakan suatu wilayah bagi kedudukan dan kepentingan VOC. Kemudian tuntutan Padtbrugge mendapat persetujuan dari kedua Raja Gorontalo memberi sebuah kawasan dibagian Selatan bandar/kota Gorontalo (daerah kampung Tenda sekarang). Setelah diberikan wilayah, maka VOC sebagai kekuatan ekonomi mendirikan *factory* (kantor dagang)

¹⁴ *Ibid* hlm.,61-62

dan *fakhuiz* (gudang penyimpanan barang) tahun 1705. Dari wilayah inilah kemudian dikembangkan menjadi sebuah pemukiman dan merupakan embrio atau cikal bakal terbentuknya semacam pusat pengendali koloni Belanda di wilayah Gorontalo. Keberadaan pemukiman VOC ternyata mendapat penolakan dari penduduk di kampung disekitarnya yang tidak menginginkan keberadaan VOC.

Tentu saja pendirian Kantor pendirian kantor dagang dimaksudkan agar dapat bersaing dengan para pedagang bangsa lainnya dan sekaligus berusaha memonopoli komoditas ekspor, khususnya emas dari Gorontalo. Untuk lebih menguatkan kepentingan politik ekonominya, VOC berhasil mengikat raja Walangadi sebagai Olongia To Tilayo setelah Walangadi menggantikan raja Lahay melalui kontrak atau perjanjian dagang. Adapun kontrak dagang itu antara lain menyatakan bahwa kerajaan Gorontalo diwajibkan memberi upeti emas kepada kompeni, dan setiap raja atau Olongia To Tilayo dan Olongia To Huliya-liyya diangkat/ditetapkan dan diberhentikan di Ternate, serta semua tata cara dan adat kerajaan akan diatur secara bersama-sama.¹⁵

Berangkat dari hubungan perjanjian tersebut cukup jelas memberikan gambaran bahwa kekuasaan VOC telah berhasil memasuki pemerintahan kerajaan dan ikut mengatur pengangkatan dan pemberhentian seorang raja. Demikian pula pada penyerahan wajib emas telah memberikan gambaran bahwa tujuan utama VOC di Gorontalo, sebagaimana juga di tempat lain, adalah berusaha memonopoli komoditas emas dan memberikan pemahaman ke negerinya bahwa Gorontalo merupakan salah satu kerajaan penghasil emas di Nederland-Indie.

Setelah raja Walangadi bergelar Ta To Payunga To Ludu pemerintah, kemudian dilanjutkan raja piola sebagai Olongian To Ti Layo. Dalam pemerintahannya, ia berusaha melepaskan pengaruh kepentingan VOC dan Ternate di Gorontalo. Kemudian raja Piola

¹⁵ *Ibid* hlm., 62-64

memerintahkannya Jogugu Male (*Ta ilayabe*) ke Ternate. Walaupun usaha Jogugu Male kurang membawa hasil karena Gubernur Maluku tetap mempertahankan Gorontalo sebagai negeri jajahannya, tetapi pihak Ternate menyatakan telah melepaskan kepentingan di Gorontalo setelah masa pemerintahan raja Piola yang bergelar Ta To Didi Hulawa selanjutnya digantikan oleh raja Botu Tihe pada 1720. Pada masa pemerintahannya, Botu Tihe banyak merencanakan berbagai pembangunan dalam kerajaan Gorontalo. Langkah penting pembangunan pada masa itu adalah berhasil mendirikan pusat pemerintahan (Balato), pembangunan pelabuhan, pasar serta penataan bandar/kota, pengaturan pemukiman, juga pembuatan jalan dan jembatan maupun pembuatan saluran-saluran air atau kanal persawahan di Tanggi kiki dan Tanggidaa. Tahun 1728 sampai 1739. Beliau memerintah kerajaan sampai usia lanjut dengan gelar *Ta To Mihirabu*.

Pada tahun 1792 Terjadi peralihan kekuasaan. Kerajaan dijabat oleh Monoarfa. Dalam masa pemerintahannya, beliau melakukan renovasi istana dari batu (meistel), mendirikan *baruadi* (berikade) pertahanan rakyat. Bahkan menentang keputusan Gubernur Abelevan tentang peng-Kristenan dan mengancam para pendeta. Atas penolakannya, beliau ditangkap dan diasingkan ke Ternate, kemudian meninggal di tempat pengasingannya, sehingga beliau bergelar Ta to Molou (yang mangkat di Maluku). Guna mengisi kekosongan kerajaan, tahun 1795 di Nobatkan Unonongo sebagai Olongia To Tilayo bergelar Ta to Piluma. Namun kekuasaan beliau sangat singkat, hanya dua bulan dan wafat. Pada tahun yang sama perahlian kekuasaan diserahkan kepada Pongoliwu II Mbuingadaqa Monoarfa. Dalam masa pemerintahan Monoarfa, pengaruh kekuasaan VOC semakin kuat baik dalam mengatur kerajaan maupun dalam monopoli perdagangan Begitupula pada masa pemerintahan Mbuingakiki Monoarfa, kekuasaan raja semakin berkurang dan peranan VOC makin besar pengaruhnya dalam mengendalikan pemerintahan kerajaan.

Hubungan Gorontalo dengan VOC berlanjut dalam rentang waktu yang panjang. VOC secara perlahan menggeser otoritas Olongia (raja) dengan memperoleh hak politik dan ekonomi untuk mengatur kekuasaannya di Gorontalo. Pada akhir abad ke-18 VOC mengalami kebangkrutan disebabkan merajalelanya korupsi yang berdampak pada krisis keuangan mereka. Pemerintah Hindia Belanda kemudian melanjutkan politik tradisional VOC dengan tujuan memperoleh penghasilan sebagai upeti dan laba perdagangan, semuanya demi keuntungan sepihaknya. Hal ini menjadi embrio masa pembentukan pemerintahan langsung Hindia Belanda, sehingga Gorontalo memasuki lembaran sejarah baru yang membawa dampak sosial, politik, budaya dan ekonomi yang mewarnai banyak aspek kehidupan masyarakat Gorontalo pada periode berikutnya.

Setelah dilaksanakan penyerahan kekuasaan VOC, maka Pemerintahan Hindia Belanda melakukan berbagai perubahan dalam usaha menjalankan kepentingannya, terutama sistem feodal yang sudah lama mendapat pengaruh VOC. Pada awal pemerintahan kolonial tahun 1809, terjadi peralihan kekuasaan kerajaan yang dijabat raja Mohammad Iskandar Pui Monoarfa. Dalam pemerintahannya, telah meleburkan 17 linula ke dalam 11 kaum yang masing-masing dijabat oleh para marsaoleh dan walaapulu. Kegiatan raja Mohamamd Iskandar Pui Monoarfa cukup besar, karena selain berposisi sebagai raja Gorontalo beliau juga sebagai raja Bone dan Limboto. Pada 14 Juni 1824 terjadi perubahan susunan tatanegara Hindia Belanda. Secara formal Gorontalo dipisahkan dari wilayah Gubernemen Ternate dan dimasukkan dalam karesidenan Manado. Walaupun demikian Keresidenan Manado tetap dalam pengawasan Gouverneur yang berkedudukan kepulauan Maluku. Dalam susunan keresidenan Manado terbagi atas dua bagian yaitu Minahasa terdiri dari Manado beserta kerajaa-kerajaan kecil Barat dan Sealatan sampai di Kadjeli Palos dan kerajaan-kerajaan Gorontalo, Limboto, dan lainnya di Teluk Tomini sampai Taliyabo. Kemudian ditambahkan wilayah keresidenan Manado meliputi kepulauan Sanger dan Talaut. Dalam perkembangan

politik selanjutnya, srtuktur pemerintahan afdeeling Manado dibagi kedalam empat bagian yaitu Minahasa; negeri-negeri utara dan barat; negeri-negeri ditepi pantai Selatan Teluk Tomini; dan kepulaun Sangihe dan Talaut. Residennya berkedudukan di manado, sedangkan pembantu-pembantunya terdiri dari seorang Gezaghebbern berkedudukan di gorontalo dan tiga orang obziener berkedudukan di Amurang, Kema; dan Tondano pada struktur pemerintahan Gorontalo, pemerintah Hindia Belanda mengangkat Gouvernement radja. Akibatnya di kerajaan gorontalo selain terdapat Olongia To Ti Layo dan Olongia To Huliyaliya bagi pemerintah Hindia Belanda disebut negorij radja juga terdapat Gouvernement radja. Wewenang Gouvernement raja adalah mengurus berbagai kepentingan pemerintahan Hindia Belanda, sedangkan negorij radja mempunyai kerajaan atas segala urusan penduduk pribumi dan bisa menarik setiap pajak pribumi. Dalam Afdeeling Gorontalo meliputi Gorontalo, Limboto, Moutong dan parigi, Bone-Suwawa-Bintauna, Boalemo, Moutong dan Parigi. Kerajaan-kerajaan tersebut telah menyepakati perjanjian atau kontrak pemerintah hindia belanda. Dalam perjanjian tersebut pada intinya memuat bahwa kerajaan-kerajaan tersebut mengakui pemerintah hindia belanda sebagai tuannya. Adapun isi perjanjian antara lain: kerajaan-kerajaan di Afdeeling Gorontalo tidak diperbolehkan mengadakan hubungan dengan luar negeri, dan semua persetujuan diantara kerajaan telah dihapuskan. Setiaap tahun mereka diwajibkan menyerahkan emas kepada pemerintah Hindia Belanda dan akan dibayar dengan nilai rey al. Banyaknya emas yang harus diserahkan akan ditentukan dalam perjanjian, dengan kata lain setiap kerajaan menyerahkan dengan jumlah yang tidak sama.

Perjanjian-perjanjian tersebut pada umumnya memang jelas memuat kepentingan-kepentingan sepihak pemerintah hindia belanda dengan cara memperluas polotik dan ekonominya melalui ikatan kontrak/perjanjian dengan raja lokal. Meski revisi demi revisi dilakukan tapi itu semua dengan maksud memperkuat cakupan penguasaan mereka.¹⁶

¹⁶ Hasanuddin ,Basri Amin, *Op. cit.*,hlm. 57-74

Berbeda dengan Masa Kolonial Belanda di Popayato dan Moutong tahun 1885 sampai pendudukan Jepang 1942, Dalam Kekuasaan Belanda Pembentukan daerah-daerah di Indonesia seringkali dikaitkan dengan dua hal, yakni pembentukan bagian dari daerah kerajaan masa lampau dan pembagian daerah menurut aturan kolonial Belanda. Pada tahun 1885 dimana kerajaan Belanda memaksakan supaya seluruh wilayah Resident Manado ialah Sulawesi Utara Tengah sudah masuk semua dalam kekuasaan pemerintah Hindia Belanda, Daeng Malino¹⁷ pada waktu itu sebagai penggawa Moutong yang menggantikan Puang Datu Menjadi Raja Moutong di mana pemerintah Hindia Belanda datang memaksakan daerah pantai timur di tengah teluk Tomini untuk menjadi daerah kekuasaan mereka. Raja Belanda memerintahkan kepada Gubernur Hindia Belanda di Batavia untuk melantik Raja Daeng Malino Menjadi Raja Moutong. Pada tanggal 1 Mei 1885 Resident Manado dan Asisten Resident Manado di Donggala datang melantik Daeng Malino menjadi Raja Moutong di Tomini dihadiri oleh Raja-raja Sulawesi Tengah di Tomini. Setelah itu Pemerintah Hindia Belanda telah Menetapkan Batas-batas dari Derah Gorontalo di Sulawesi Utara dan Kerajaan Moutong di Sulawesi Tengah, dalam hal ini Resident Manado mewakili pemerinta Hindia Belanda di Batavia menetapkan batas daerah Gorontalo di Sulawesi Utara dengan kerajaan Moutong Sulawesi Tengah Pada tahun 1885. Kedua pemeritah daerah yang diprakarsai oleh pemerintah Belanda yang di wakili oleh yang mulia Resident Manado yang mewakili perintah Hindia Belanda di Batavia telah menetapkan batas dari ke dua daerah yang bertetangga. Dan disaksikan oleh Pemerintah masing-masing dari daerah tersebut yaitu, sebagai berikut :

- Yang mulia Ulea Uwabu dan Frinceland Sirajudin Oliy dan D.K.K yang mewakili Pemerintah Gorontalo.

¹⁷ Kurais.D.P. Masulili Binti Borman. *X Silsila Kerajaan Moutong*. Hlm.,59. Daeng Malino, pemimpin kerajaan Moutong pertama setelah Belanda menyebarkan kekuasaannya yang di beri gelar Panggawa atau sebutan lain yaitu Raja.

- Daeng Malino raja Moutong mewakili raja Moutong didampingi oleh Masulili Badan Penasihat raja, Angkadu Kapitalau, Lomohamad Kapitang Eeya, Olongian Tinombo, Olongian Tomini , Latalatu Walaapulu, Syah Bandar Kono, Kapitalau Jakatare, Daeng Manurung, Laganja Kepala Kampung Moutong , Lambakanrang pemuka masyarakat, Uwa Kowa Olongian Popayato dan 7 Tadulako yang di bawah oleh yang mulia Raja Daeng Malino dari Tinombo. Dalam penetapan Perbatasan itu Raja Daeng Malino Mengikut Sertakan kemenakanya Borman (Andi Yusuf dan anak Beliau Andi Baso).

Kapal Putih yang Membawa Rombongan dari kedua daerah itu di bawa pimpinan yang mulia Resident Manado dan Asisten Resident Donggala, Asisten Resident Gorontalo Menuju Pulau Pajongge, Kemudian Berlabuh di Muka Pulau Pajongge di muka kampung Popayato. Kemudian Resident Manado Memerintakan agar supaya rapat diadakan di dalam kapal putih/kapal Tomini. Setelah rapat dimulai dipimpin langsung oleh yang mulia Resident Manado, dalam rapat tersebut Resident Manado bertanya kepada yang mulia Ulea Uwabu bahwa batas daerah gorontalo itu sampai dimana, Kemudian Ulea Uwabu telah menentukan bahwa batas daerah Gorontalo sampai Tomini (Popa) atau kampung tomini sekarang. Selanjutnya yang mulia Resident Manado mengalihkan pertanyaan kepada yang mulia raja Moutong Daeng Malino, bahwa batas kerajaan Moutong sampai dimana, yang mulia raja Moutong Menjawab atas pertanyaan yang mulia Resident Manado, dimana beliau menentukan bahwa batas kerajaan Moutong sampai di marisa.

Resident Manado sebagai wakil pemerintah Hindia Belanda yang penuh kekuasaan telah berfikir dalam penetapan batas kedua daerah ini Masing-Masing memiliki nota Sejarah. Pada akhirnya Raja Daeng Malino Memukul Meja dengan tangannya sampai baju beliau robek di belakang, demi memepertahankan batas dari kerajaan Moutong di tengah Teluk Tomini Sulawesi tengah Resident Manado mewakili pemerintah Hindia Belanda di Batavia, dimana Resident Manado sebagai wasit yang sangat berkuasa sangat memperhatikan kondisi

dan situasi yang sudah berjalan langsung, Resident Mando Mengingat menimbang langsung, memutuskan dimana batas yang sebenarnya, jangan sampai kedua daerah yang bertetangga ini menjadi bermusuhan. Dari tuntutan kedua raja itu di batalkan oleh yang mulia Resident Manado sebagai wasit yang berkuasa, dimana saja batas yang dibentuk oleh yang mulia harus disetujui oleh kedua belah pihak yang dipimpin langsung oleh Resident Manado mewakili pemerintah Hindia Belanda di Batavia. Resident Manado akhirnya memerintahkan agar supaya diukur jaraknya mulai dari kampung Popayato Sampai kampung Moutong Propinsi Sulawesi Tengah sekarang. Setelah selesai pengukuran yang jumlahnya sekitar 32 Km, Resident Manado memutuskan jumlah 32 Km ini di bagi menjadi 2 atau sama sehingga masing-masing mendapatkan hasil 16 Km. Resident Manado mewakili pemerintah Hindia Belanda di Batavia memutuskan bahwa sungai Molosipat Menjadi Perbatasan dari kedua Daerah yang bertetangga. Resident Mando menghimbau, dari kedua raja itu berjabatan tangan tanda menyetujui atas perbatasan yang di putuskan oleh yang Mulia Resident Manado¹⁸. Berdasarkan uraian diatas maka peneliti mengangkat judul tentang ***Popayato dan Moutong pada Masa Kolonial Belanda***

1.2 Rumusan Masalah

Adapun penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan Popayato dan Moutong pada Masa Kolonial Belanda tahun 1885 sampai pendudukan Jepang tahun 1942.

1.3 Kerangka Teoretis dan Pendekatan

Studi sejarah yang akan di sampaikan ini termasuk dalam kategori sejarah lokal. Walsh¹⁹ mengemukakan bahwa sejarah lokal merupakan sebagai sasaran studi kita, bertemu dengan terkaburnya pengertian sejarah sebagai kejadian di waktu lampau dan sejarah

¹⁸ Kurais.D.P. Masulili Binti Borman. *X Silsilah Kerajaan Moutong*. hlm. 59-60

¹⁹ Wals dalam Taufik Abdullah *Sejarah Lokal di Indonesia*. (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996) Hlm., 1-2

sebagaimana ia diceritakan. Bukanlah persoalan filsafat sejarah, yang spekulatif, yang akan di bahas tetapi hal-hal yang bersifat kritis ilmiah. maka hal ini kita melibatkan diri sejenak pada persoalan metodologis.

Jean Hecht²⁰ Corak-corak tertentu dari sejarah lokal, ialah “struktur dan proses dari tindakan dan interaksi manusia sebagaimana terjadi dalam konteks sosial – kultural di masa lampau yang tercatat”. Jika memakai pendekatan sejarah sosial maka suatu sejarah lokal harus memeperhitungkan dan memepertimbangkan dengan baik ikatan struktural, yaitu jaringan peranan-peranan sosial yang saling bergantung, terhadap aktor sejarah.

Dalam usahanya untuk mengerti sosial dinamik tertentu seorang ahli sejarah lokal akan mencoba melihat apakah kaitan peristiwa dari gejala dengan struktur sosial. Jika ia sedang memperhatikan suatu atau serangkaian peristiwa maka, ia tak akan puas untuk menerangkannya hanya dari sudut hubungan kasual, sebab-akibat dengan peristiwa-peristiwa lain. ia akan menerangkan pula dari sudut kerangkah sosial kultural, di mana peristiwa itu terjadi. Ia akan menjadikan kerangka sosial-kultural sebagai wadah dari peristiwa.²¹

Dalam kaitan penelitian ini, pendekatan teori-teori kekuasaan yang telah di gunakan untuk mendekatkan pemahaman-pemahaman masyarakat atas apa yang telah di sampaikan oleh penulis mengenai sebab-akibat dari faktor-faktor kekuasaan barat terhadap masyarakat pribumi, dalam hubungan dengan pembetukan perbatasan wilayah kerajaan Moutong dan daerah Gorontalo yg di bentuk oleh pemerintah Belanda dalam kekuasaannya di wilayah tersebut.

²⁰ Jean Hecht dalam Taufik Abdullah *Sejarah Lokal di Indonesia*. Hlm.,20-21

²¹ Taufik Abdullah. *Sejarah Lokal di Indonesia*. (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996), hlm. 21-22.

Secara umum Menurut Lewin Kekuasaan adalah kemampuan potensial dari seseorang/kelompok orang untuk mempengaruhi yang lain dalam sistem yang ada. Ada dua konsepsi berbeda tentang kekuasaan yang dianut dalam bahasa awam.

1. Kekuasaan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi individu-individu lain.
2. Kekuasaan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi pembuatan keputusan kolektif.
3. Kita sering mengatakan bahwa seseorang memiliki kekuasaan atas orang lain, yang berarti bahwa orang pertama dapat membuat orang kedua bertindak menurut apa yang diinginkan oleh orang pertama, dan orang kedua bertindak menurut apa yang diinginkan oleh orang pertama, dan orang kedua tidak bisa memilih tindakan lain

Untuk menentukan apakah Teori-teori kekuasaan ini termasuk dalam tipe yang dimaksud atau berhubungan dengan kekuasaan yang ada di wilayah Kerajaan Moutong maka diperlukan sumber-sumber sejarah yang berhasil di kumpulkan dalam pengungkapan sejarahnya.

Menurut Max Weber Kekuasaan adalah kesempatan seseorang atau sekelompok orang untuk menyadarkan masyarakat akan kemauannya sendiri dengan sekaligus menerapkannya terhadap tindakan-tindakan perlawanan dari orang-orang atau golongan-golongan tertentu.²²

Bila di hubungkan dengan kekuasaan belanda yang ada di wilayah Popayato dan Moutong pada tahun 1885 baik kekuasaan dalam politik, ekonomi, sosial, budaya, dapat di

²² Amir Sutarga. *Politik Etis dan Revolusi Kemerdekaan*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1983), hlm., 9-10

lihat dari karakteristik masyarakatnya dalam menghadapi kekuasaan kolonial belanda. Karakteristik yang di maksud disini bagai mana mental masyarakat pribumi berjuang untuk melawan penjajahan belanda dengan melakukan suatu cara apapun untuk mempertahankan diri dari penjajahan kolonial belanda. Kerangka seperti inilah yang antara lain akan di coba di bangun di bangun sebagai salah satu pendekatan dalam penelitian ini.

Dengan demikian asumsi penulis yang dapat di kemukakan dalam penelitian ini yaitu: keterlibatan masyarakat pribumi kerajaan Moutong dan Popayato dalm menghadapi kekuasaan kolonial belanda

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian adalah : untuk mendeskripsikan Popayato dan Moutong pada Masa Kolonial Belanda tahun 1885 sampai pendudukan Jepang tahun 1942.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah mengangkat kembali sejarah "*moutong dan popayato pada masa kolonial belanda*", sehingga dijadikan latar pengetahuan lokal untuk sistem pemerintahan di wilaya kerajaan moutong dan daerah gorontalo. Manfaat kategori sejarah lokal paling tidak akan dapat menjangkau : pertama, pengembangan prespektif historis dari sejarah mikro itu sendiri yang dapat mempertajam analisis dalam memahami konteksnya dengan peristiwa di tingkat yang lebih luas. kedua, dapat memebentuk pemahaman terhadap dinamika masyarakat tertentu bahwa peristiwa itu pernah terjadi di masa Lampau. ketiga, bahwa dengan menelaah tindakan-tindakan yang besar, baik individu maupun kelompok dapat di pahami sebagai suatu gerakan sosial yang timbul dan merupakan indikator perubahan sosial yang terjadi, Oleh karena luasnnya ruang lingkup manfaat tersebut di atas.

1.6 Tinjauan Pustaka dan Sumber

Bahan-bahan pustaka yang ditinjau dapat berupa buku-buku, hasil-hasil penelitian, dan artikel-artikel ilmiah. Ada pun jumlah pustaka yang dapat di tinjau oleh peneliti di antaranya ; Sejarah kabupaten Parigi Moutong, Gorontalo dalam dinamika sejarah Masa Kolonial, X silsila kerajaan Moutong

- Syakir Hamid dkk. Sejarah Kabupaten Parigi Moutong. Yogyakarta. Ombak. 2012. Dalam buku ini penulis menuliskan tentang terbentuknya kerajaan Moutong merupakan cikal bakal dari kerajaan Kasimbar. Pada 1771 pemindahan pusat kekuasaan dari Kasimbar ke Moutong dengan pertimbangan bahwa Moutong lebih strategis dalam mengawasi seluruh wilayah Tomini dan juga merupakan pintu gerbang menuju ke wilayah Tomini. Perpindahan pusat kekuasaan ini dijadikan sebagai awal berdirinya kerajaan Moutong.
 - Penelitian ini relevan dengan penelitian sebelumnya tetapi berbeda dengan judul yang telah diteliti sekarang yaitu Popayato Moutong Pada Masa Kolonial Belanda.
- Hasanudin, Basri amin. Gorontalo Dalam Dinamika Sejarah Masa Kolonial. Yogyakarta. Ombak. 2012. Dalam buku ini penulis menuliskan tentang Lambang Kekuasaan atau pusaka peninggalan kerajaan. Setiap kerajaan Mempunyai benda pusaka sebagai lambang kewibawaan dan kekuasaan kerajaan sangat dihormati oleh dengan demikian keberadaan suatu kerajaan dapat mengangkat kewibawaan kerajaan dimata rakyatnya.
- Kurais. D.P. Masulili Binti Borman. X Silsila Kerajaan Moutong. Dalam buku ini penulis menuliskan tentang beberapa raja yang menduduki tahta kerajaan di antaranya raja Tombolotutu.

- Penelitian ini relevan dengan penelitian sebelumnya tetapi berbeda dengan judul yang telah diteliti sekarang yaitu Popayato Moutong Pada Masa Kolonial Belanda.

1.7 Metode Penelitian

Dalam Metode sejarah prosedur penelitian yang akan digunakan harus mengikuti tahapan-tahapannya sebagai berikut :

➤ Heuristik

Tahap dalam Mengumpulkan sumber, pengumpulan sumber yang dimaksud disini yaitu sumber yang dapat diperoleh dari perpustakaan, hasil wawancara di lokasi penelitian atau pun sumber lain yang dapat mendukung penelitian sejarah ini. Sebab usaha merekonstruksi masa lampau tidak mungkin dilakukan tanpa tersedianya sumber-sumber atau bukti-bukti sejarah seperti peninggalan-peninggalan kolonial Belanda ketika berkuasa di daerah tersebut. Maka dilaksanakannya langkah pengumpulan sumber-sumber sejarah dalam bentuk dokumen-dokumen, atau hasil dari wawancara di lokasi penelitian.

➤ Kritik Sumber

Kritik sumber (verifikasi), tahap ini dilakukan untuk menguji validasi sumber-sumber sejarah agar peneliti dapat membedakan mana sumber yang akurat dan tidak akurat. Seperti sumber yang didapatkan dari beberapa informan yang berbeda sehingga menunjukkan keakuratan atau tidaknya sumber tersebut.

➤ Interpretasi

Pada tahap ini yaitu, menafsirkan atau memberi makna kepada fakta-fakta atau bukti-bukti sejarah. Interpretasi diperlukan dalam penulisan sejarah karena pada dasarnya

bukti-bukti sejarah sebagai saksi realitas di masa lampau. Fakta-fakta atau bukti-bukti dan saksi sejarah itu tidak bisa berbicara sendiri mengenai apa yang disaksikannya dari realitas masa lampau, Sejarawan yang jujur akan mencantumkan data keterangan darimana data itu diperoleh sehingga orang lain dapat melihatnya atau menafsirkannya kembali.

➤ **Historiografi**

Historiografi atau penulisan sejarah tahap ini menjadi sarana mengkomunikasikan, hasil-hasil penelitian yang diungkap, diuji dan diinterpretasi. Karya penulisan penelitian sejarah dapat mengambil beberapa bentuk seperti paper, artikel, atau buku, bahkan dalam bentuk buku-buku yang berjilid-jilid. Masing-masing bentuk memiliki prinsip-prinsip yang berbeda, menuntut komposisi dan gaya bahasa, serta jenis-jenis kerja yang berlainan pula. Menyusun sejarah berarti mengisahkannya, pengisahan ini dimulai dari keadaan permulaan dengan batasan tempat dan waktu secara kronologis. Sehingga dalam penulisan ini lebih di fokuskan pada prinsip-prinsip umum penulisan sejarah ilmiah pada umumnya.²³

1.8 Sistematika Penulisan

Rekonstruksi Historiografi ini dijabarkan dalam empat bab, yang masing-masing dibagi dalam beberapa subbab. Antara bab yang satu dengan bab yang lainnya merupakan satu sistem yang tidak terpisah. Dalam bab pertama diuraikan tentang pengantar yang terdiri dari tujuh subbab,²⁴ yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka teoretis dan pendekatan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka dan sumber, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

²³ Daliman. *Metode penelitian Sejarah*. (Yogyakarta: Ombak, 2012), hlm. 51-80

²⁴ *Op. Cit*, Sejarah Gorontalo Modern., hlm. 13-14

Bab dua berisi tentang awal masuknya Kolonial Belanda di Popayato dan Moutong. Bab ini terdiri dari empat subbab, yaitu sistem administratif sebelum kedatangan Bangsa Belanda, kedatangan Kolonial Belanda, perjuangan Raja Tombolotutu, serta lambang kekuasaan

Bab tiga berisi tentang Popayato dan Moutong akhir masa kekuasaan Kolonial Belanda, bab ini terdiri dari dua subbab, yaitu awal kedatangan Pendudukan Jepang, serta akhir pendudukan Jepang sampai Indonesia Merdeka 1945

Bab empat berisi tentang kesimpulan dan saran, bab ini terdiri dari dua subbab, yaitu simpulan, serta saran.